

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING
(Studi Pada SKPD Kota Dumai)**

Oleh :

Dewi Asfiryati

Pembimbing : Enni Savitri dan Al Azhar A

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : dewiasfiryati@ymail.com

*Effect Of Application Of Financial Accounting System And Financial Statements
Presentation Of Financial Management Accountability Of The Internal Control
Systems As An Intervening Variable
(A Study On The Regional Work Units Dumai)*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of applying the area of financial accounting system and financial statements to the accountability of financial management with the internal control system as an intervening variable in the regional work units Dumai City. Data from this study using primary data. The study population was all employees units Dumai City. Samples of this study was 102 respondents using purposive sampling. Methods of data analysis used in this research is the analysis of the path with the help of SPSS software. The results of testing the hypothesis in this study shows the area of financial accounting system implementation and presentation of financial statements does not directly influence the accountability of financial management. However, the area of financial accounting system implementation and presentation of financial statements a influence on the internal control system. Internal control system affects the accountability of financial management. Implementation of the area of financial accounting system indirect effect on financial management accountability through internal control systems as mediation or intervening variable. And presentation of financial statements indirect effect or financial management accountability through internal control systems as mediation or intervening variable.

Keywords : Regional Financial Accounting System Application, Presentation of Financial Statements, Financial ManagementAccountability, Internal Control System

PENDAHULUN

Terselenggaranya *Good*
Government *Governance*

(keperintahan yang baik) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan

serta cita-cita bangsa bernegara. *Good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Halim, 2007).

Baik buruknya laporan keuangan salah satunya dapat dilihat melalui sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan laporan keuangan, pengamatan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008).

Menurut (PP 60 Tahun 2008) undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya sistem akuntansi yang usang dan tidak akurat akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas (Aribowo, 2007).

Berlakunya PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan berbasis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban yang bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Fenomena laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau

merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Riau masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atau setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan kata lain akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam mengontrol maupun mencapai hasil pada pelayanan publik. Pencapaian pertanggungjawaban perlu dilakukan secara transparansi melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik).

Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas laporan dan peraturan yang berlaku dalam

suatu lembaga instansi pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka terhadap masyarakat. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *Good Government Governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat nilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung pemerintah daerah dan kekayaan yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang investaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2007).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Standar akuntansi pemerintah yang

selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan kedalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar.

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami,

Sistem Pengendalian Intern

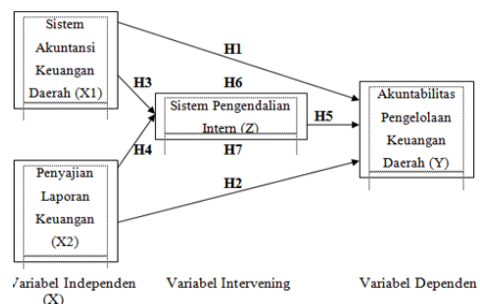
Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan

laporan keuangan, pengamatan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008).

Pengendalian akuntansi yang merupakan bagian dari struktur pengendalian intern meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk menjaga kekayaan dan catatan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian administrasi meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Salah satu keuntungan bagi manajemen adalah untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek operasi dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan.

Hipotesis

Gambar 1
Model Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan, 2016

- H1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- H2 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

- H3 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern.
- H4 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern.
- H5 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- H6 : Peranan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem pengendalian Intern.
- H7 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem pengendalian Intern.

METODE PENELITIAN

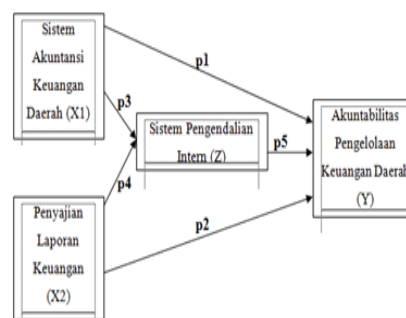
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD pemerintah daerah (Pemda) di Kota Dumai. Pemilihan sampel didasarkan pada metode pengambilan sampel tidak acak atau nonrandom sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling yaitu sampel yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan penelitian Sekarat, (2006). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah pejabat pada SKPD pemerintah daerah Kota Dumai yang berjumlah 34 SKPD. Dari kriteria pejabat pada setiap SKPD akan diambil 3 responden yaitu Bendahara, Kasubag Keuangandan, Staf Bagian Keuangan sehingga sampel yang diambil dalam

penelitian ini berjumlah 102 responden.

Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis path (analisis jalur). Analisis path (analisis jalur) merupakan pengguna analisis regresi untuk menaksir hubungan kualitas antar variabel yang telah ditetapkan Ghozali (2005). Hipotesis bisa diterima jika hasil regresi menunjukkan tingkat signifikansi dibawah 0,05 ($p < 0,05$). Hipotesis ditolak jika hasil regresi menunjukkan hasil signifikansi diatas 0,05 ($p > 0,05$).

**Gambar 2
Model Jalur (Path)**



Sumber : Data Olahan, 2016

Gambar diagram path menggunakan model jalur (path) diatas memberikan hubungan kualitas antar variabel yang ditunjukkan oleh anak panah. Setiap p menggambarkan jalur dan koefesennya. Di dalam analisis jalur ini dilakukan regresi terhadap 2 persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_{APKD} = b_0 + b_{PSAKD} + b_{PLK} + b_{SPI} + e_1 \dots \dots \dots \text{persamaan regresi 1}$$

$$Y_{SPI} = b_0 + b_{PSAKD} + b_{PLK} + e_2 \dots \dots \dots \text{persamaan regresi 2}$$

Keterangan :

Y_{APKD} = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 Y_{SPI} = Sistem Pengendalian Intern
 b_{PSAKD} = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 b_{PLK} = Penyajian Laporan Keuangan
 b_{SPI} = Sistem Pengendalian Intern
 e = Error

Definisi Operasional Variabel

a. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

b. Sistem Pengendalian Intern
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah
Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

d. Penyajian laporan keuangan
Penyajian laporan keuangan yaitu *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi atau laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakaiannya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). r_{tabel} dari penelitian ini adalah 0,196. Hal ini berarti masing-masing item pertanyaan dari variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penyajian laporan keuangan adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Untuk pengujian reliabilitas penulis akan melihat dari cronbach alpha. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, jika nilai alpha lebih besar dari 0,06 maka data yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Hasil uji reabilitas dapat dilihat dari tabel 1 berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Batasan Nilai	Reliabilitas
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	13	0,733	0,60	Reliable
Penyajian Laporan Keuangan	8	0,735	0,60	Reliable
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	12	0,875	0,60	Reliable
Sistem Pengendalian Intern	12	0,753	0,60	Reliable

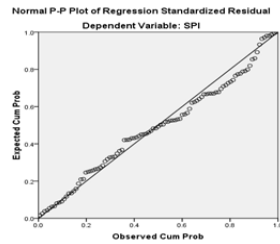
Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Hasil Uji Normalitas

Untuk melihat normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data penelitian ini dapat dilihat dari normal probability plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data menyebar secara acak dan tidak berada di

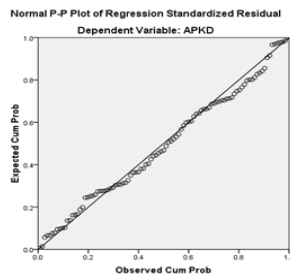
sekitar garis diagonal, maka asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Normal probability plot pada penelitian ini terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3
Hasil Normalitas – Persamaan Regresi 1



Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Gambar 4
Hasil Normalitas – Persamaan Regresi 2



Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Tampilan grafik normal probability plot pada gambar 3 sampai dengan 4 menunjukkan bahwa titik titik (data) penyebaran sekitar garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Sedangkan, uji abnormalitas dengan uji statistik menggunakan non parameter test one-sample Kolmogorov-Smirnov (I-Sample K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan KolmogorovSmirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak

normal. Hasil uji dengan uji statistik I-Sample K-S disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2
Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,59857728
	Absolute	,059
Most Extreme Differences	Positive	,058
	Negative	-,059
Kolmogorov-Smirnov Z		,586
Asymp. Sig. (2-tailed)		,882

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data berada diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam keadaan normal dan layak dilakukan uji hipotesis.

4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen) maupun variabel intervening. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas antara lain dengan melihat *Variance Inflation Factor*(VIF) dan tolerance, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas (Ghozali, 2006).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Variabel Independen	Variabel Dependen	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
Persamaan regresi 1	PSAKD	APKD	0,919	1,088
	PLK		0,944	1,059
	SPI		0,881	1,136
Persamaan regresi 2	PSAKD	SPI	0,988	1,012
	PLK		0,988	1,012

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, dari semua variabel tersebut semua nilai toleransi berada diatas > 0,1 dan nilai VIF dibawah <

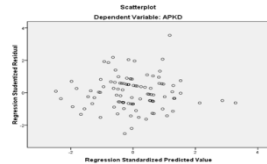
10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji pembahasan untuk menguji apabila dalam sebuah model regresi jadi ketidak samaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Pemeriksaan terhadap gejala Heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola pencar (scatterplot). Jika diagram pencar yang ada membentuk pola-pola tertentu yang diatur maka regresimengalami gangguan Heteroskedastisitas (Puwanto, 2004).

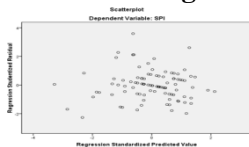
Gambar 5 sampai 6 dibawah ini merupakan gambar hasil uji Heteroskedastisitas dimana diagram pencar yang ada tidak membentuk pola atau acak, maka regresipada penelitian ini tidak mengalami gangguan Heteroskedastisitas.

Gambar 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas -
Persamaan Regresi 1



Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Gambar 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas -
Persamaan Regresi 2



Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Tampilan gambar 5 sampai dengan 6 diatas, memperlihatkan titik-titik mpenyebar secara acak serta tersebut diatas maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu Y. Hal ini

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model represi dalam penelitian layak untuk digunakan.

Hasil Pengujian Regresi

Setelah data dikumpulkan, diseleksi, di uji validitas dan reabilitasnya kemudian pengujian regresi yang dikembangkan sesuai dengan hipotesis. Pengujian dalam penelitian ini adalah path analysis dan di olah dengan program pengolahan data SPSS.

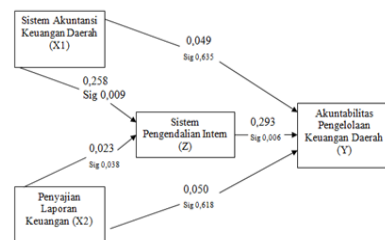
Berikut ini merupakan hasil pengujian hipotesis untuk persamaan regresi 1, dan persamaan regresi 2 :

Tabel 4
Hasil Uji Persamaan Regresi

Model	Variabel Bebas	Variabel Terikat	Standardized Beta	t value	Sig.	F value	Sig.	Adjusted R ²
Pers. Reg 1	PSAKD		0,049	0,476	0,635	3,174	0,028	0,324
	PLK	APKD	0,50	0,500	0,618			
	SPI		0,293	2,807	0,006			
Pers. Reg 2	PSAKD	SPI	0,258	2,677	0,009	6,508	0,002	0,510
	PLK		0,203	2,107	0,038			

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Gambar 7
Hasil Pola Hubungan Antar Variabel



Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,635. Karena nilai signifikan > 0,05, maka dapat diartikan bahwa penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan H1 ditolak yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,049. Artinya adalah kurangnya tenaga-tenaga kerja akuntansi yang terampil, sistem dan prosedur pembukuan tidak memadai sehingga kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola keuangan daerah tidak berjalan dengan baik.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,618. Karena nilai signifikan $> 0,05$, maka dapat diartikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan H2 ditolak yaitu penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,050. Artinya adalah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintah yang diterima umum agar terwujudnya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Sistem Pengendalian Intern.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009. Karena nilai signifikan $< 0,05$, maka dapat diartikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern. Maka dapat disimpulkan H3 diterima yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian intern yang dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,258. Artinya adalah dengan adanya sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*).

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,038. Karena nilai signifikan $< 0,05$, maka dapat diartikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern. Maka dapat disimpulkan H4 diterima yaitu Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian intern yang dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,203. Artinya adalah sistem pengendalian intern terutama pengendalian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Semakin baik sistem pengendalian intern akan semakin baik pelaporan keuangan daerah. Ketika sistem pengendalian intern berjalan dengan efektif Kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan tidak akan terjadi, sehingga laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah akan akuntabel. Sehingga peran sistem pengendalian intern dapat meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006. Karena nilai signifikan $< 0,05$, maka dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan H5 diterima yaitu sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,293. Artinya adalah akuntabilitas keuangan suatu daerah akan terlaksana jika sistem pengendalian intern dalam instansi daerah berjalan dengan baik.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Pengendalian Intern

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,049. Sedangkan pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui sistem pengendalian intern sebesar 0,075.

Dengan demikian maka diketahui pengaruh langsung 0,049 lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsung (0,075). Maka dapat disimpulkan H6 diterima yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian intern sebagai mediasi atau variabel intervening. Hal ini karena adanya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), maka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berjalan dengan efektif sehingga

terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5
Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening

Direct impact	Indirect impact	Keterangan	Hipotesis
PSAKD - APKD = 0,049	PSAKD - SPI - APKD = 0,258 x 0,293 = 0,075	Direct impact < Indirect impact	Diterima

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Pengendalian Intern

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa pengaruh langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,050. Sedangkan pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui sistem pengendalian intern sebesar 0,050.

Dengan demikian maka diketahui pengaruh langsung 0,050 lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsung (0,059). Maka dapat disimpulkan H7 diterima yaitu penyajian laporan keuangan berpengaruh tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai mediasi atau variabel intervening. Penyajian laporan keuangan yang baik, pelaporan keuangan daerah akan dapat dipertanggung jawabkan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Dapat dilihat pada tabel 6 :

Tabel 6
Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening

Direct impact	Indirect impact	Keterangan	Hipotesis
PLK - APKD = 0,050	PLK - SPI - APKD = 0,203 x 0,293 = 0,059	Direct impact < Indirect impact	Diterima

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Sesuai dengan perumusan masalah hipotesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan Penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kota Dumai melalui sistem pengendalian intern. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena kurangnya tenaga-tenaga kerja akuntansi yang terampil, sistem dan prosedur pembukuan tidak memadai sehingga kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola keuangan daerah tidak berjalan dengan baik.
- 2) penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diterima umum agar terwujudnya peningkatan

- akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 3) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern. Hal ini karena dengan adanya sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kekeliruan pada pemerintah daerah.
 - 4) penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern. Hal ini karena sistem pengendalian intern yang efektif kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan tidak akan terjadi, sehingga laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah akan akuntabel.
 - 5) sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena akuntabilitas keuangan suatu daerah akan terlaksana jika sistem pengendalian intern dalam instansi daerah berjalan dengan baik.
 - 6) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian intern sebagai mediasi atau variabel intervening. Hal ini karena adanya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), maka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berjalan dengan efektif sehingga terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
 - 7) penyajian laporan keuangan berpengaruh tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian intern sebagai mediasi atau variabel intervening. Penyajian laporan keuangan yang baik, pelaporan keuangan daerah akan dapat dipertanggung jawabkan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Data penelitian ini berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrument kuesioner yang dapat mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dan mungkin akan berbeda apabila data diperoleh melalui teknik wawancara.
- 2) Kuesioner yang disebar hanya pada SKPD dinas-dinas di Pemerintah Kota Dumai, tanpa mengikut sertakan SKPD di luar Pemerintah Kota Dumai. Hal ini mengakibatkan jawaban yang di berikan oleh responden yang kurang variatif.
- 3) Penelitian ini hanya menggunakan variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga berkemungkinan

terdapat variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah lebih besar dari pada ketiga variabel indepen

Saran

Hasil penelitian ini minimal dapat motivasi untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.dengan adanya pertimbangan pada keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan agar:

- 1) Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menggunakan variabel dan model penelitian yang berbeda yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Bagi instansi diharapkan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan prinsip akuntansi publik, dan peningkatan pada sistem pengendalian intern.
- 3) Diperlikannya adanya evaluasi lanjutan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Aribowo, Fajar. 2007. Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas. *Harian Bisnis Indonesia*. 10 November 2007.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

—— Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

—— Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung- jawaban Keuangan Daerah.

—— Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Dearah.

—— Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sekarat, Uma. (2006). *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk*

Bisnis. Jakarta: Salemba Empat

Widyaningsih, Aristanti. 2011.
Hubungan Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Pemda Kabupaten/ kota Wilayah Provinsi Jawa Barat).
Simposium Nasional Akuntansi XIV.